UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Hukum Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
DEBY RAHMATUL FITRI, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhan, Ashshofa. Metode Penelitian Hukum" Cetakan Ke-4. Jakarta:Rineka Cipta, 2009.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hajati, Sri, et al. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Ismail, Nurhasan .Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik. Malang: Setara Press, 2024.

Koswara, Indra Yudha, dan Santoso, Imam budi. Kejahatan Pertanahan Dalam Menghadapi Gurita Mafia Tanah Dalam Kasus Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan Di Indonesia Ditinjau Dari Pertanggungjawaban Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi, et al, Hukum Pertanahan: Teori, Regulasi dan Praktik di Indonesia. Padang: CV Gita Lentera, 2025.

Nurdewata, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2019.

Sihombing, Irene Eka. Segi-segi Hukum Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Universitas Trisakti, 2005.

Simarmata, Rikardo. kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga. Jakarta: UI Press, 1986.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Hukum Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
DEBY RAHMATUL FITRI, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Tim Peneliti STPN. Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Hukum Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
DEBY RAHMATUL FITRI, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 624 K/Sip/1970.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 234 K/Pdt/1992.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767 K/Sip/1970.

Skripsi/Tesis

Alfatah, Imam Ali. Akibat Hukum Bagi Tanah Yang Ditelantarkan Di Desa Pagerwangi Bandung Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2022.

Ginting, Mentari Maharani Br. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Berdasarkan Perkara Perdata Nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR. Skripsi, Universitas Riau, 2016.

Medisa, Fela. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Pakai Yang Digugat Oleh Pemilik Skgr (Surat Keteragan Ganti Rugi) Dikaitkan Dengan Pasal 43 Ayat 1 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tesis, Universitas Pasundan, 2021.

Nabila, Kholida. Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Dalam Jual Beli Tanah Di Pekanbaru (Studi Kasus Tanah Milik Boy Desvinal Salam), Skripsi, Universitas Trisakti, 2020.

Nofitri, Dian Komala. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah, Analisis Kasus Putusan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Hukum Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
DEBY RAHMATUL FITRI, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97- 98/Pdt/2009/PN-PBR. Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Winata, Meta Nadia. Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Tesis, Universitas Indonesia, 2021.

Jurnal

Afifah, Fatma, et al. Konsep Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 3 , Nomor 2 (September), https://jurnal.uwp .ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/326/93

Aliyah, Melatul, et al. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Adat Yang Belum Bersertifikat (Studi Di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Indonesia Law Reform Journal, 1, No 2, (Juli), https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16947/9623

Azizah, Nur, et al. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan. Jurnal Akta Notaris, 2, Nomor 19 (Juni), https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/Akta Notaris/article/download/899/812

Dethia, Nadila Sandy. Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Indonesian Notary, 2 , Nomor 20, (September), https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article =1350&context=notary

Handayani, Niken Ariska, et al. Akibat Hukum Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanpa Alas Hak Yang Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wsb). Diponegoro Law Journal, 8, Nomor 3 (Juli),

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Hukum Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
DEBY RAHMATUL FITRI, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/26001/23411

Harahap, Mita Yasmina, et al. Kajian Yuridis Peralihan Tanah Milik Adat melalui Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (PHGR) dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 6, No. 3 (Maret), https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1447

Hirmanto, Rizki dan Rahayu, Mella Ismalina Farma. Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Woriasi Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan pada Badan Hukum PT. Sinar Wijaya Plywood Industries dalam Konteks Kepastian Hukum. Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19, Nomor 2 (Oktober) https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/12183

Jasril, et al, Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Negara Terhadap Pemegang Surat Keterangan ganti Rugi dalam Gugatan Perdata, Jurnal Yustitia, 11 , Nomor 1, (April), https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323

Maiyori, Cisilia, et al. Kepastian Hukum Atas Tanah Dengan Surat SKGR Sebagai Jaminan Utang Pada Perbankan di Kota Pekanbaru. Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM), 3, Nomor 2, (Juli), https://ojs.stmikdharmapalariau.ac.id/index.php/jssdm/article/view/694

Murni, Christiani Sri dan Sulaiman, Sumirahayu. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah", Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum, 8, Nomor 2, (Juni), https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/370

Nabila, Viola Khansa, dan Nazir, Yendri. Kualitas Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 3,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Hukum Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
DEBY RAHMATUL FITRI, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nomor 2, (April), https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/27647

Salim, Sumitro. Penerapan Sifat Terang dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah yang Belum Lunas(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT.G/2020), Journal Indonesian Notary, Volume 3 Nomor 4, (Desember),https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=notary

Sitompul, Helena Albright. Permasalahan Sengketa Kepemilikan dengan Alas Hak Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) Serta Akibat Bagi Pemegangnya, Unes Law Review, 6, Nomor 2, (Desember), https://review-unes.com/law/article/view/1433

Internet

Ulwan Ma'luf. "Problematika SKGR Menjadi Bukti Kepemilikan Tanah di Provinsi Riau". https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/problematika-skgr-menjadi-bukti-kepemilikan-tanah-di-riau-0wJ, (diakses 31 maret, 2026)